

LKIP 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II MERAUKE**



BERANI
JUJUR!
HEBAT!

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel dibawah ini:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban, serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	100%	125%
		2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%
		4. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA Score)	94%	88.92%	94.6%
		5. Persentase (%) observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota	80%	93.55%	117%
		6. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12	12	100%
		7. Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur	35%	233.7%	668%
		8. Persentase tindak lanjut penggunaan frekuensi illegal	50%	100%	200%
		9. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi	2	2	100%
		10. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR	85%	85.71%	101%
		11. Persentase penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan	95%	100%	105%
		12. Jumlah laporan berfungsinya perangkat monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12	12	100%

		13. Persentase berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	85%	111.35%	131%
		14. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT	100%	100%	100%
		15. Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL atas waba yang telah dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	100%
		16. Jumlah laporan penanganan Waba untuk pencegahan dan pengurangan waba berpiutang	12 Laporan	12 Laporan	100%
		17. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku	1 dokumen	1 dokumen	100%
		2. Jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku	1 dokumen	1 dokumen	100%
		3. Jumlah dokumen penatausahaan kepegawaian UPT	1 dokumen	1 dokumen	100%
		4. Jumlah dokumen keuangan UPT	1 dokumen	1 dokumen	100%
		5. 10 Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%

*Note : (6) didapat dari nilai (5) dibagi (4)

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Program I “Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban, serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi” terdapat 17 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT.

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke melaksanakan 4 kali kegiatan pemantauan frekuensi radio di wilayah dalam kota Merauke dan 3 kali kegiatan pemantauan frekuensi radio di wilayah Kabupaten Merauke. 100% kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan semua, terdiri dari 93,5% observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasar ISR di Kabupaten/Kota, 12 laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable, 12 laporan berfungsinya perangkat monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable, 233.7% stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur, 100% tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal, 2 laporan Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi (Penertiban Nasional di Kota Merauke), 85.71% pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR dan 111.35% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT.

Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio

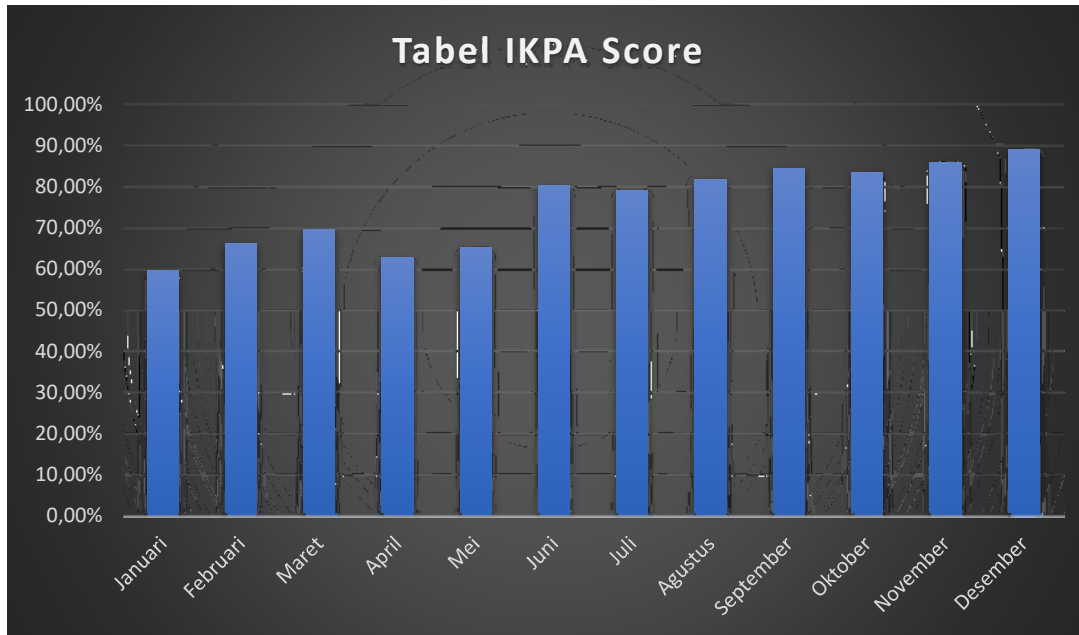
Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menyelesaikan target pemenuhan pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat serta penanganan BHP frekuensi radio dengan prosentase sebesar 100%. Terdiri dari penyelesaian penanganan gangguan di Kab. Yahukimo pada bulan September 2019, penanganan gangguan perkumpulan SILVA Papua, dan penanganan gangguan ORARI di kota Merauke pada bulan November 2019. 100% pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio. 4 laporan triwulan pendampingan KPKNL atas wajib bayar yang telah dilimpahkan (Nihil). 12 laporan penanganan wajib bayar untuk pencegahan dan pengurangan wajib bayar berpiutang. 100% terlaksananya UNAR baik dalam kota maupun luar kota.

Persentase (%) Layanan Administrasi yang dilaksanakan Sesuai dengan Perencanaan.

Di tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menargetkan layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yaitu 100%. Dalam realisasinya, berhasil melaksanakan 100% dengan acuan 1 dokumen perencanaan program kerja dan anggaran, 1 dokumen pengelolaan BMN sesuai dengan aturan yang berlaku, 1 dokumen penatausahaan kepegawaian UPT dan 1 dokumen keuangan UPT.

Persentase (%) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score).

Tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menargetkan 94% untuk dapat meraih nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA Score). Dari kenaikan indeks setiap bulan, akhirnya pada bulan Desember 2019 di tutup dengan nilai akhir sebesar 88,92%. Jumlah persentase tahun 2019 adalah sebesar 94.6%.



Persentase (%) Observasi 22 Pita Frekuensi dan Monitoring Frekuensi Berdasarkan ISR di Kab/Kota.

Pada daftar perjanjian kinerja tahun 2019 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menargetkan 80%. Dalam realisasi nya, ternyata mampu melaksanakan dengan persentase sebesar 93,55%. Kegiatan yang dilakukan adalah Observasi dan Monitoring Okupansi serta identifikasi Kab/Kota yang termonitor, yaitu Kota Merauke, Kab. Bovendigoel, Observasi dan Monitoring dalam rangka refarming 2,1 GHz, Observasi dan Monitoring dalam rangka Pemilu 2019, Observasi dan Monitoring di Kab. Yahukimo, Kab. Mappi, dan Obsmon pendataan pengguna frekuensi radio dalam kota Merauke.

Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap dan Transportable.

Di tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke memiliki 1 stasiun tetap HF dengan status kondisi rusak berat dan 2 stasiun monitoring SMFR transportable. Dalam membuat laporan okupansi stasiun SMFR tetap menggunakan perangkat LS Telcom Site Merauke. Setiap bulannya, seksi pemantauan dan penertiban rutin membuat dan mengirim laporan monitoring, sehingga dalam 1 tahun mencapai 12 Laporan dari target 12 laporan dalam tahun 2019.

Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio FM dan TV) yang Terukur.

Dalam perjanjian kinerja tahun 2019 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menargetkan 35% presentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV). Dalam realisasi nya, kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengukuran Coverage Area Frekuensi Radio Siaran di Kab. Merauke dan Kab. Boven Digoel.
2. Pengukuran Parameter Teknis 4 Stasiun TV Kab. Merauke
3. Pengukuran dalam Rangka Posko Lebaran
4. Pengukuran Parameter Teknis Radio Siaran di Kota Merauke
5. Pengukuran Frekuensi 5.8 GHz di Kab. Asikie
6. Pengukuran Parameter Teknis Radio Siaran di Kab. Boven Digoel

Persentase (%) tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal.

Dalam perjanjian kinerja tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menetapkan target 50% tindak lanjut dari penggunaan frekuensi ilegal. Dalam realisasi capaian, berhasil menindaklanjuti 20 (dua puluh) penggunaan frekuensi ilegal. Diantaranya 7 (tujuh) frekuensi ilegal dari hasil pendataan lokasi pengguna frekuensi radio 5Ghz pada bulan Oktober di kota Merauke dan distrik Asikie, serta telah diberikan surat peringatan pertama.

Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi.

Dalam melaksanakan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melakukan kegiatan penertiban nasional di dalam kota Merauke pada bulan November 2019 dan di luar kota Merauke.

Persentase penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan.

Di tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melaksanakan 2 (dua) aduan gangguan frekuensi radio, yang pertama yaitu adanya gangguan frekuensi radio berdasar dari aduan perkumpulan Silva Papua, kedua berdasar aduan dari ORARI di Kabupaten Yahukimo.

Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke juga melaksanakan layanan administrasi dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menyusun rencana program kerja tahunan dengan total pagu dalam DIPA Rp. 7.311.554.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 2.952.511.000,- dan PNPB sebesar Rp. 4.374.036.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Target
1	2	3	4
1	Layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika Balai Monitor Merauke	Rp. 913.210.000,-	22 Layanan
2	Layanan penyelesaian penanganan gangguan Balai Monitor Merauke	Rp. 62.590.000,-	3 Layanan
3	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT. Ditjen SDPPI.	Rp. 1.742.906.000,-	1 Layanan
4	Layanan sarana dan prasarana internal (base line)	Rp. 213.000.000,-	1 Layanan
5	Layanan perkantoran (base line)	Rp. 4.379.848.000,-	12 bulan layanan

b. Ketata usahaan dan Rumah Tangga

Ketata usahaan.

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementrian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Propinsi Papua, Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Kabupaten Merauke, serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio

- ✓ Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2019 adalah sebanyak 275 surat.
- ✓ Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke selama periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebanyak 228 surat dan Surat Perintah Tugas sebanyak 161 surat.

Kerumah Tanggaan.

Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor serta peralatan rumah tangga kantor.

Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 2 (dua) kontrak.

c. Kepegawaian

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Merauke memiliki sumber daya manusia sejumlah 11 pegawai ASN dan 20 pegawai Non ASN. Pegawai negeri sipil terdiri dari : golongan IV sejumlah 1 pegawai, golongan III sejumlah 7 pegawai dan golongan II sejumlah 3 pegawai. Pada tahun 2019 terdapat 3 pegawai kenaikan pangkat/golongan dan 7 pegawai kenaikan gaji berkala, sedangkan dari segi pendidikan formal pendidikan S1 sejumlah 7 pegawai, D3 sejumlah 3 pegawai, SMK sejumlah 1 pegawai.

d. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke posisi Desember 2019 yang terserap sebesar Rp. 6.990.746.814,- dari pagu Rp. 7.311.554.000,- atau sebesar 96%

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke melakukan revisi DIPA sebanyak 3 kali yaitu revisi administrasi berupa 1 (satu) kali rencana penarikan dana, 1 (satu) belanja barang dan 1 (satu) kali revisi pagu minus.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh,
Shalom,
Om swasiastu,
Namo Buddhaya,



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun 2019, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan seksi Pemantauan dan Penertiban, Seksi Sarana dan Pelayanan serta Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dilingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui LKIP Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015-2019 dan Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2019. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum, Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Merauke, Januari 2019

KEPALA BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE

TTD

SIMSON LIHA, SH

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. POTENSI DAN PERMSALAHAN STRATEGIS	4
D. SISTEMATIKA LAPORAN	5
BAB II PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. SASARAN PROGRAM	6
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	9
SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO	
1. IK-1 Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	11
2. IK-2 Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	12
3. IK-3 Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	14
4. IK-4 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	14
5. IK-5 Persentase (%) observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota	16
6. IK-6 Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	16
7. IK-7 Persentase (%) stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur	17
8. IK-8 Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi	17
9. IK-9 Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR	17
10. IK-10 Persentase penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan	18
11. IK-11 Persentase (%) penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan	18

12. IK-12 Jumlah Laporan Berfungsinya Perangkat Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap dan Transportable	19
13. IK-13 Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring di UPT	19
14. IK-14 Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT	19
15. IK-15 Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL atas Waba yang telah dilimpahkan	20
16. IK-16 Jumlah Laporan penanganan Waba untuk Pencegahan dan Pengurangan Waba berpiutang	20
17. IK-17 Persentase (%) terlaksananya Ujian Negara Amatir Radio	20
 SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF	
18. IK-1 Jumlah Dokumen Perencanaan Program kerja dan Anggaran dan Pelaporan	21
19. IK-2 Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN Sesuai dengan Aturan yang berlaku	22
20. IK-3 Jumlah Dokumen Penatausahaan Kepegawaian UPT	22
21. IK-4 Jumlah Dokumen keuangan UPT	23
 BAB IV PENUTUP	 24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama seperti sumber daya alam yang ada di tanah dan juga air, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan warga negara. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Merauke dan sekitarnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian negara amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban.

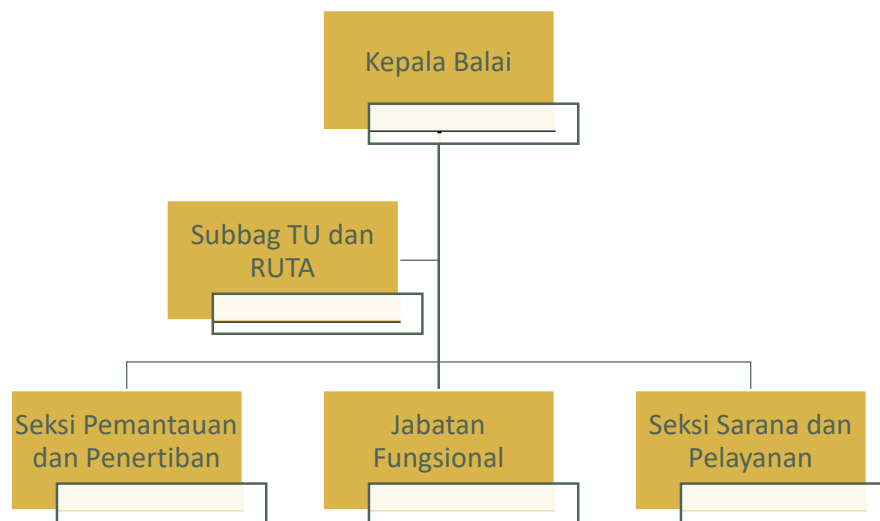
Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, dan penertiban terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

3. Seksi Sarana dan Pelayanan.

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, sosialisasi serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Merauke

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Secara geografis wilayah Merauke berada paling selatan dari Pulau Papua dan merupakan Kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia, dengan luas wilayah 44.071 km². Seiring dengan itu pembangunan infrastruktur telekomunikasi mengalami pertumbuhan begitu pesat yang sebarannya tidak tertumpu pada kota Merauke saja, namun juga mulai menyebar di 4 kabupaten lainnya di Wilayah Merauke seperti pembangunan Transportable, layanan internet dan akses jaringan telekomunikasi. Begitu pula dengan pengguna spektrum frekuensi radio mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti penyelenggara broadcasting, radio konsesi, operator seluler dan penyelenggara TV Kabel. dan jumlah pengguna spektrum frekuensi radio yang berizin (ber ISR) berjumlah 1.062 ISR. Berdasarkan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas dan fungsi Balmon Kelas II Merauke disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balmon Kelas II Merauke dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat pada Balmon Kelas II Merauke yang memiliki kompetensi teknis sudah mumpuni, tapi saat ini masih diperbantukan di Subbag tata Usaha dan Rumah Tangga sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang administrasi dan keuangan yang notabene tepat sasaran penempatan nya di Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, serta peningkatan bimtek dan *capacity building*.
- b. Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (*capacity Building*) di bidang teknis perlu ditingkatkan.
- c. Regulasi penggunaan spektrum yang belum komprehensif belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia, sehingga implementasi regulasi spektrum yang belum optimal, hal ini dibutuhkan sosialisai yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke meliputi :

- a. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
- d. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2015-2019 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas.

B. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2015 – 2019 yang telah disusun adalah sasaran Program yang akan dicapai.

C. PERJANJIAN KINERJA 2019

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%
		2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%
		3. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%

		4. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	94 dari skala 100
		5. Persentase (%) observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota	80%
		6. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 laporan
		7. Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur	35%
		8. Persentase (%) tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal	50%
		9. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi	12 laporan
		10. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR	85%
		11. Persentase penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan	95%
		12. Jumlah laporan berfungsinya perangkat monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 laporan
		13. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	85%
		14. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT	100%
		15. Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL atas waba yang telah dilimpahkan	4 laporan
		16. Jumlah laporan penanganan Waba untuk pencegahan dan pengurangan waba berpiutang	12 laporan
		17. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisien dan Efektif	1. Jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku	1 dokumen
		2. Jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku	1 dokumen
		3. Jumlah dokumen penatausahaan kepegawaian UPT	1 dokumen

		4. Jumlah dokumen keuangan UPT	1 dokumen
		5. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		6. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.311.554.000,- sebelum revisi yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2019 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	100%
		2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	100%
		3. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%
		4. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	94 dari skala 100	88.92 dari skala 100
		5. Persentase (%) observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota	80%	93.55%
		6. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 laporan	12 laporan
		7. Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur	35%	233.7%
		8. Persentase (%) tindak lanjut penggunaan frekuensi illegal	50%	100%

		9. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi	12 laporan	12 laporan
		10. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR	85%	85.71%
		11. Persentase penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan	95%	100%
		12. Jumlah laporan berfungsinya perangkat monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 laporan	12 laporan
		13. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	85%	111.35%
		14. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT	100%	100%
		15. Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL atas waba yang telah dilimpahkan	4 laporan	4 laporan
		16. Jumlah laporan penanganan Waba untuk pencegahan dan pengurangan waba berpiutang	12 laporan	12 laporan
		17. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisien dan Efektif	1. Jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku	1 dokumen	1 dokumen
		2. Jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku	1 dokumen	1 dokumen
		3. Jumlah dokumen penatausahaan kepegawaian UPT	1 dokumen	1 dokumen
		4. Jumlah dokumen keuangan UPT	1 dokumen	1 dokumen
		5. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%
		6. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%

SASARAN 1.**MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI****1. IK-1 Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT.**

Indikator Kinerja Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT memiliki target sebesar 80%. Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke mencapai realisasi 93.55% dari kegiatan observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/Kota, 233.7% stasiun radio penyiaran (radio FM dan TV) yang terukur, 100% tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal, 85.71% pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR, serta 111.35% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring di UPT

Dalam jangka waktu 1 tahun menghasilkan 12 laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable, 12 laporan berfungsinya perangkat monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable, serta 2 laporan pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi (Penertiban Nasional dikota Merauke).

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja “Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT” yang ditargetkan mencapai 80% secara akumulasi sampai dengan Desember 2019 telah tercapai 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kerja yaitu 100%.

2. IK-2 Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio.

Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio memiliki target sebesar 100%. Sepanjang tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melaksanakan 100% penyelesaian aduan/klaime dan konsultasi yang diselesaikan, 100% pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio, dan 100% terlaksananya Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) baik di dalam kota maupun luar kota Merauke.

Dalam kurun waktu 12 bulan terdapat 4 laporan triwulan pendampingan KPKNL atas wajib bayar yang telah dilimpahkan (NIHIL) dan 12 laporan penanganan wajib bayar untuk pencegahan dan pengurangan wajib bayar berpiutang.

a. Penanganan Gangguan.

Penanganan gangguan dilaksanakan sesuai dengan aduan, yaitu sekali penanganan gangguan di kab. Yahukimo, dan 2 (dua) kali penanganan gangguan di kota Merauke.

No	Kegiatan	Bulan	Status
1	2	3	4
1.	Penanganan gangguan kab. Yahukimo	September	Selesai
2.	Pengananan gangguan perkumpulan SILVA Papua	November	Selesai
3.	Penanganan gangguan ORARI	November	Selesai



2.2 Sosialisasi dan Bimbingan teknis

Sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan 1 (satu) kali di bulan November 2019. Bertemakan “Tertib Penggunaan Frekuensi Radio dan Perangkat Demi Keamanan dan Keselamatan Nelayan”, kegiatan ini dihadiri oleh 80 (delapan puluh) orang yang bertempat di Gedung Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara kota Merauke.



2.3 Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke di Tahun 2019 sudah melaksanakan kegiatan UNAR sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, dan yang kedua dilaksanakan di bulan November 2019.

TINGKAT	PESERTA	HASIL	
		LULUS	TIDAK LULUS
1	2	3	4
SIAGA	10 Orang	10 orang	0 Orang
PENGGALANG	0 Orang	0 Orang	0 Orang
PENEGAK	0 Orang	0 Orang	0 Orang

Table 1.3.1 Kegiatan UNAR 1

TINGKAT	PESERTA	HASIL	
		LULUS	TIDAK LULUS
1	2	3	4
SIAGA	48 Orang	38 orang	10 Orang
PENGGALANG	13 Orang	12 Orang	1 Orang
PENEGAK	4 Orang	3 Orang	1 Orang

Table 2.2.2 Kegiatan UNAR 2

22. IK-3 Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Perencanaan.

Indikator Kinerja Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebesar 100 %. Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke memiliki dokumen perencanaan program kerja (PROKER) dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku, dimana program kerja ini menjadi acuan untuk Langkah strategis dalam mewujudkan realisasi setiap bulan.

Dokumen pengelolaan BMN sesuai dengan aturan yang berlaku dibuat setiap bulan, dengan setiap bulan rutin melaksanakan rekonsiliasi dengan SAIBA, melihat laporan neraca SIMAK bulanan dan laporan persediaan. Laporan per semester dibuat guna menghasilkan Laporan Keuangan yang mencerminkan akuntabilitas.

Dokumen penatausahaan kepegawaian UPT berisi tentang semua pegawai yang pada tahun 2019 akan mengalami KGB (Kenaikan Gaji Berkala), KP (Kenaikan Pangkat), maupun pensiun.

Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa nilai dari hasil rumusan kedua Indikator dimaksud sebesar 100% sedangkan target adalah 100% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

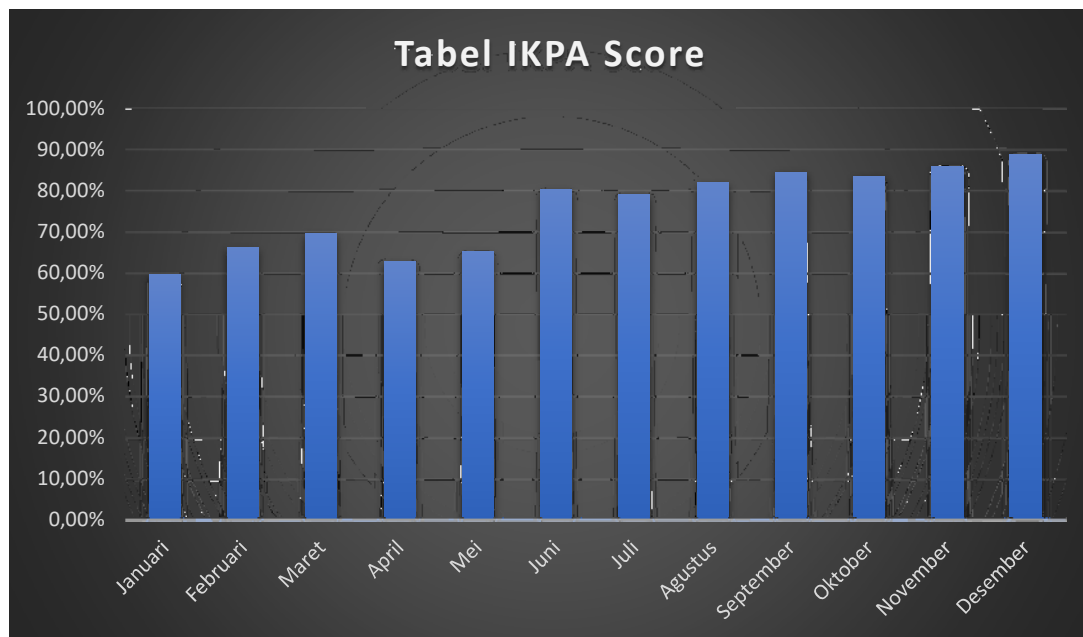
23. IK-4 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score).

Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score) UPT memiliki target 94 dari skala 100. IKPA ini menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap

regulasi. Sesuai dengan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA adalah sebagai berikut :

- Kelancaran pelaksanaan anggaran.
- Mendukung manajemen kas.
- Meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke pada tahun 2019 mendapatkan nilai akhir IKPA sebesar 88.92 dari target sebesar 94. Dari hasil tersebut maka persentase (%) yang didapat adalah 94.6%.



24. IK-5 Persentase (%) Observasi 22 Pita Frekuensi dan Monitoring Frekuensi Berdasarkan

ISR di Kab/kota.

Indikator Kinerja Persentase (%) observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota memiliki target realisasi sebesar 80%. Sepanjang tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melaksanakan beberapa kegiatan observasi dan monitoring okupansi serta identifikasi baik di kabupaten maupun di kota wilayah kerja, antara lain kota Merauke, Kab. Bovendigoel, Kab. Yahukimo, dan Kab. Mappi.

Observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi meliputi beberapa hal, di antaranya okupansi, identifikasi dan pendataan perangkat telekomunikasi yang dijual di toko yang ada di wilayah Merauke.

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1	2	3
1	Observasi dan Monitoring Dalam Kota	5
2	Observasi dan Monitoring Luar Kota	4

25. IK-6 Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap dan Transportable.

Indikator Kinerja jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable adalah 12 laporan. Di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke memiliki 1 (satu) stasiun tetap HF dan 2 (dua) stasiun monitoring SMFR transportable. Stasiun monitoring SMFR terletak di kantor pos kota Merauke dan di kantor pos Tanah Merah, Kab. Bovendigoel.

Dalam setiap bulan, laporan yang di buat sebanyak 1 buah, dan dalam pembuatan laporan okupansi stasiun SMFR tetap menggunakan perangkat LS Telcom Site dikarenakan status stasiun tetap HF sedang dalam status rusak.

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke mencapai target presentase sebesar 100%.

26. IK-7 Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio FM dan TV) yang Terukur.

Indikator Kinerja persentase (%) stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah sebesar 35%. Beberapa kegiatan yang dapat direalisasikan dapat ditampilkan dalam table dibawah ini :

No	Jenis Pengukuran	Wilayah
1	2	3
1	Coverage Area	Kab. Bovendigoel
2	Parameter Teknis 4 Stasiun TV	Kab. Merauke
3	Posko Lebaran	Kab. Merauke
4	Parameter Teknis Radio Siaran	Kota Merauke
5	Frekuensi 5.8GHz	Kab. Asikie
6	Parameter Teknis Radio Siaran	Kab. Bovendigoel

27. IK-8 Persentase (%) Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Illegal.

Indikator Kinerja persentase (%) Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Illegal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah sebesar 50%. Realisasi yang dilakukan pada saat dilakukan pendataan lokasi pengguna frekuensi radio 5GHz pada bulan Oktober di kota Merauke dan distrik Asikie dan telah diberikan surat peringatan pertama.

Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke mencapai target presentase (%) sebesar 100%.

28. IK-9 Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi.

Indikator Kinerja Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi yang ditargetkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah 2 (dua) laporan. Laporan dibuat setelah selesai kegiatan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi.

Dari hasil yang diperoleh, kegiatan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi sudah dilaksanakan pada bulan November 2019. Dapat disimpulkan bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio mencapai target presentase (%) sebesar 100%.

29. IK-10 Persentase (%) Pelaksanaan Inspeksi sebagai Tindak Lanjut Validasi Data ISR.

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Inspeksi sebagai Tindak Lanjut Validasi Data ISR yang ditargetkan di tahun 2019 adalah 85%. Dalam realisasinya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah melaksanakan inspeksi konsesi di Kab/Kota Merauke. Hasil nya adalah 300 data inspeksi staisun radio yang sesuai dari 350 data sampling yang telah ditindaklanjuti (85.71%).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Balai Monitor Spektrum Fekuensi Radio Kelas II Merauke mencapai target sebesar 85.71% dari yang ditargetkan 85%.

30. IK-11 Persentase (%) penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan.

Indikator Kinerja persentase (%) penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah 95%. Akumulasi yang berhasil ditangani adalah 3 (tiga) aduan di bulan September dan November.

No	Kegiatan	Bulan	Status
1	2	3	4
1.	Penanganan gangguan kab. Yahukimo	September	Selesai
2.	Pengananan gangguan perkumpulan SILVA Papua	November	Selesai
3.	Penanganan gangguan ORARI	November	Selesai

Dari hasil tersebut Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah mencapai realisasi sebesar 100%, maka Indikator Kinerja persentase nya adalah 105%.

31. IK-12 Jumlah Laporan Berfungsinya Perangkat Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap dan Transportable.

Indikator Kinerja Jumlah laporan berfungsinya perangkat monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable yang ditargetkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah 12 laporan. Laporan dibuat setiap bulan guna memantau berfungsi atau tidaknya perangkat monitoring.

Jika diketahui ada yang rusak akan dengan mudah dan cepat untuk dilakukan tindak lanjut. Dari hasil tersebut didapatkan presentase (%) capaian adalah 100%.

32. IK-13 Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring Ukur di UPT.

Indikator Kinerja Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebesar 85%. Jumlah perangkat utama dan pendukung yang dimiliki sejumlah 187. Dimana perangkat dengan kondisi baik berjumlah 177, sedangkan 10 lainnya kondisi rusak dan sudah masuk dalam daftar BMN berstatus rusak berat.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase (%) indikator kinerja nya adalah sebesar 111.35%.

33. IK-14 Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT.

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah 100%. Baru pada bulan November 2019 kegiatan Sosialisasi dapat berjalan. Bertempat di Gedung Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara kota Merauke dan dihadiri oleh 80 orang peserta dengan tema "Sosialisasi Pengguna Frekuensi Radio Maritim".

34. IK-15 Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL Atas Waba yang telah Dilimpahkan.

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL Atas Waba yang telah Dilimpahkan yang ditargetkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah 4 (empat) laporan, dengan 1 (satu) laporan per triwulan. Dalam waktu 12 bulan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke membuat laporan sebanyak 4 (empat) buah, yaitu laporan pendampingan KPKNL triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL Atas Waba yang telah Dilimpahkan mencapai target yaitu 100%.

35. IK-16 Jumlah Laporan Penanganan Waba untuk Pencegahan dan Pengurangan Waba Berpiutang.

Indikator Kinerja Jumlah laporan penanganan Waba untuk pencegahan dan pengurangan waba berpiutang yang ditargetkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sejumlah 12 (dua belas) laporan. Rekapitulasi sampai bulan Desember 2019 terdapat 12 laporan penanganan waba, mulai dari penyampaian SPP, rincian tagihan, surat tagihan maupun surat peringatan.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Jumlah laporan penanganan Waba untuk pencegahan dan pengurangan waba berpiutang Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dengan capaian 100%.

36. IK-17 Persentase (%) terlaksananya Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).

Indikator Kinerja Persentase (%) terlaksananya UNAR di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah 100%. Dalam program kerja anggaran yang dimiliki Balai Monitor SFR Kelas II Merauke, kegiatan UNAR direncanakan untuk di adakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu UNAR Dalam Kota dan UNAR Luar Kota.

UNAR dalam kota diselenggarakan pada bulan Oktober 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 10 (sepuluh) orang. Sedangkan untuk kegiatan UNAR luar kota diselenggarakan pada bulan Desember 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 80 (delapan puluh) orang.

- UNAR Dalam Kota.

TINGKAT	PESERTA	HASIL	
		LULUS	TIDAK LULUS
1	2	3	4
SIAGA	10 Orang	10 orang	0 Orang
PENGGALANG	0 Orang	0 Orang	0 Orang
PENEGAK	0 Orang	0 Orang	0 Orang

- UNAR Luar Kota.

TINGKAT	PESERTA	HASIL	
		LULUS	TIDAK LULUS
1	2	3	4
SIAGA	48 Orang	38 orang	10 Orang
PENGGALANG	13 Orang	12 Orang	1 Orang
PENEGAK	4 Orang	3 Orang	1 Orang

SASARAN 2.**TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF.**

Sebagai upaya mendukung peningkatan pada pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika Ditjen SDPPI, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke melakukan kegiatan berupa :

- ✓ Perencanaan program kerja yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- ✓ Mengolah Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Menatausahakan seluruh dokumen kepegawaian dalam 1 (satu) tahun.
- ✓ Menatausahakan seluruh dokumen keuangan demi kelancaran realisasi anggaran.

1. IK-1 Jumlah Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran dan Pelaporan Kinerja sesuai Aturan yang berlaku.

Indikator Kinerja untuk Jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebanyak 1 (satu) dokumen. Dokumen tersebut berisi tentang rencana program kerja yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun. Dokumen tersebut menjadi acuan kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dalam melaksanakan realisasi dalam 1 (satu) tahun.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran dan Pelaporan Kinerja sesuai Aturan yang berlaku	1 dokumen	1 dokumen	100%

2. IK-2 Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN Sesuai dengan Aturan yang Berlaku.

Indikator Kinerja dari Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Perjanjian Kinerja yaitu 1 (satu) dokumen. 1 dokumen tersebut dapat berisi mengenai laporan neraca SIMAK BMN yang harus ada di setiap bulannya, berdampingan dengan laporan persediaan, pencatatan barang persediaan yang masuk maupun keluar habis dipakai.

Data dari aplikasi persediaan dan SIMAK BMN untuk setiap bulan wajib rekonsiliasi dengan data dari aplikasi SAIBA guna mendapatkan laporan keuangan yang akuntabel. Di setiap akhir semester terdapat laporan semester, yaitu semester I dan semester II.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 dokumen	1 dokumen	100%

3. IK-3 Jumlah Dokumen Penatausahaan Kepegawaian UPT.

Indikator Kinerja dari Jumlah Dokumen Penatausahaan Kepegawaian UPT yaitu 1 (satu) dokumen. Dalam 1 (satu) tahun berisi rangkuman seluruh data pegawai ASN Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, baik yang mutasi, naik pangkat, maupun kenaikan gaji berkala.

- Daftar Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) per Desember 2019.

No	NAMA/NIP	Gol/Ruang	Masa Kerja
1	2	3	4
1.	SIMSON LIHA, SH NIP. 196409181986031005	Pembina / IV.A	28 Tahun 00 Bulan
2.	HELMY ZAINUDDIN, ST, MT NIP. 197912082008031001	Penata Tk. I/III.D	11 Tahun 00 Bulan
3.	MAKLON RONSUMBRE NIP. 196205201989031005	Penata Tk. I/III.D	30 Tahun 00 Bulan
4.	PETRUS SARJU NIP. 196803261990031004	Penata Muda Tk. I/III.B	28 Tahun 00 Bulan
5.	MUHTADI, SE NIP. 197805052005021003	Penata Muda Tk. I/III.B	15 Tahun 00 Bulan
6.	AGUSTINUS ZENDRATO, S.Sos NIP. 196808171989031006	Penata Muda /III.A	29 Tahun 00 Bulan

No	NAMA/NIP	Gol/Ruang	Masa Kerja
1	2	3	4
7.	SYAMSUL BAHRI NIP. 198405102008031002	Penata Muda /III.A	12 Tahun 00 Bulan
8.	RULANDY THOMAS NIP. 198712112008031001	Pengatur /II.C	12 Tahun 00 Bulan
9.	PANUNTUN WIBOWO NIP. 198611212015041001	Penata Muda /II.D	04 Tahun 00 Bulan
10.	ANDI NURHIKMAH ALI NIP. 196803261990031004	Penata Muda /II.D	04 Tahun 00 Bulan

- Mutasi/Rotasi Aparatur Sipil Negara



4. IK-4 Jumlah Dokumen Keuangan UPT.

Indikator Kinerja Jumlah dokumen keuangan UPT ditargetkan 1 (satu) dokumen. Rekapitulasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi tentang laporan keuangan di semester I dan semester II, serta Laporan Pertanggung Jawaban bendahara setiap bulannya.

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan presentase capaian kinerja jumlah dokumen keuangan UPT mencapai 100%.

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2019 ini, sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas II Merauke selaku unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio serta mengawasi perangkat pos dan informatika yang digunakan maupun yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan layanan telekomunikasi utamanya telekomunikasi berbasis spektrum frekuensi radio (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, telah ditetapkan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja yang mendukung 2 (dua) Sasaran Program Ditjen SDPPI. Dari hasil Analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peranan dan penilaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke. Pada LKIP ini sudah menggunakan Indikator Kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap LKIP ini.